



sumber : <https://www.setop.org/pelky-indonesia/indonesia-andomb-19-covid-19>

Kita memulai tahun 2020 dengan penuh harapan besar akan mimpi kita yang akan terwujud, akan tetapi kita merasakan hal yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya yaitu pandemi Covid-19, karena pandemi ini mimpi-mimpi dan harapan kita di tahun 2020 pun tertunda. Tanggal 14 maret adalah awal dimulainya pandemi di Indonesia yang diumumkan langsung oleh Pak Presiden Joko Widodo.

Dimulainya pandemi di Indonesia kita sebagai warga negara merasakan dampak yang sangat besar akan pandemi ini dengan perilaku yang berbeda dari biasanya, mulai dari bekerja dari rumah, belajar dari rumah, hingga beribadah dari rumah. Hal tersebut dinamakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Berbagai aturan yang telah ditetapkan pemerintah demi memutus rantai penyebaran covid-19 akan tetapi tantangan terberat pemerintah adalah kedisiplinan dari rakyat Indonesia dalam menjalankan protokol kesehatan baik dari menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kita sebagai masyarakat pasti pernah melihat masyarakat yang lalai dalam menjalankan protokol kesehatan dengan begitu kita harus saling mengingatkan satu sama lain agar selalu menjalankan protokol kesehatan.

Di ujung tahun 2020, bangsa kita memiliki harapan dalam menekan kasus covid-19 yaitu pada tanggal 6 desember 2020 Indonesia menerima 1,2 juta dosis vaksin covid-19 yang merupakan buatan dari Sinovac yang didatangkan dari Beijing, China. Dengan mendengar berita tersebut masyarakat Indonesia-pun melebarkan senyuman, memejamkan mata, serta menaruh harapan besar di tahun 2021. Walaupun vaksin corona masih dalam tahap pemeriksaan oleh BPOM bukan berarti perjuangan kita sudah berakhir, kita harus tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan yaitu 3M (Mencuci Tangan, Memakai Masker, dan Menjaga Jarak) agar kita tercegah dari penyebaran Covid-19 dan segera bisa berkegiatan dengan normal kembali.



sumber : <https://toppost.com/2020/03/23/indonesia-tanpa-efektifitas-eflagge-51-emergency-keag-dinas-covid-19-covid-19-covid-19>



sumber : <https://www.thejakartapost.com/travel/indonesia/2020/12/07/first-shot-of-covid-19-vaccine-landed-in-indonesia.html>



Horas Medan

PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

TRIWULAN IV

Kenali Kuliner Khas Sumatera Utara

Apakah teman-teman pernah mencoba kuliner yang ada di Sumatera Utara? Jika belum maka teman-teman bisa melihat berbagai macam kuliner khas Sumatera Utara di sini! Sumatera Utara merupakan provinsi yang terdapat banyak kota besar di dalamnya, salah satunya Medan, sebagai ibukota provinsi Sumut. Salah satu ciri khas makanan dari daerah ini yaitu menggunakan buah andaliman yang memiliki rasa pedas getir. Ciri

1. Bika Ambon

Nama ambon diambil dari jalan Ambon di Medan, tempat pertama kali dijual dan dibuat makanan ini. Kue ini terbuat dari tepung, santan, gula, dan kuning telur, nantinya akan difermentasi dengan menambahkan air nira. Penggunaan air nira inilah yang membuatnya berbeda dan khas. Biasanya orang-orang yang jalan ke Medan akan membawa Bika sebagai oleh-oleh lo.



sumber : <https://resepkuhi.id/resep/resep-bika-ambon/>

2. Sop Udang

Biasanya kita akan melihat soto sapi dan juga ayam tetapi jika teman-teman ke Sumatera Utara maka teman-teman bisa menemukan soto yang jarang di hidang di restoran manapun yaitu Soto Udang, yaa soto udang merupakan salah satu kuliner khas dari Sumatera Utara karena ada banyaknya orang hindu di medan dan orang hindu tidak bisa makan sapi maka di buatla soto udang di dampingi suliran ayam di dalamnya membuat banyak wisatawan tertarik dengan soto udang ini.



sumber : <https://www.sopudang.com/indonesia/10007480/resep-masakan-soto-udang-tekong-kejaran-berkhas-santun-yang-selengkapnya-bikin-anti-bangkala-kota/?page=all>

3. Arsik

Ikan arsik adalah salah satu kuliner khas batak. Karena Sumatera Utara mempunyai banyak penduduk batak maka ikan termasuk salah satu kuliner khas Sumatera Utara. Ikan arsik ini mempunyai rasa yang khas karena menggunakan rempah yang jarang di temukan di luar Toba Sanosir yaitu andaliman. Andaliman merupakan rempah yang mempunyai rasa pedas dan getir jika kita makan, oleh karena itu teman-teman harus mencobanya jika berkunjung ke area Toba ya!



sumber : <https://www.merdeka.com/2018/04/10/mengungkap-arsik-ikan-mas-kuliner-batak-yang-melengkapi-lambang-keberhasilan.html>

4. Kolak Durian

Kalo biasanya kolak itu memakai ubi dan pisang di Medan kolak itu memakai daging durian lo!. Karena durian sangat melimpah di Medan maka durian di gunakan di beberapa makanan seperti kolak durian dan pancake durian. Biasanya wisatawan selalu memakan durian jika datang ke Medan karena rasanya yang manis dan juga ukurannya yang besar. Jadi jika teman-teman mau puas makan durian datang aja ke medan.



sumber : <https://www.resepkuhi.com/2018/04/10/mengungkap-arsik-ikan-mas-kuliner-batak-yang-melengkapi-lambang-keberhasilan.html>

Dari Redaksi.....

Pada edisi Triwulan IV kali ini, Buletin Horas Medan Menyajikan berita mengenai rangkaian kegiatan dan kuliner diantaranya Kenali Kuliner Khas Sumatera Utara, Penyerahan Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2020, Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA 2020 dan Kilas Balik Kondisi Indonesia di Tahun 2020. Selamat membaca dan tetap jaga kesehatan anda

Dewan Redaksi

- Pengarah : Eydu Oktain Panjaitan
- Penanggungjawab : Sigit Hermawan
- Ketua : Ludfi Noviandi
- Pelaksana:
- Venny, M. Amin, Ahmad Nur, Heryando
- Tetap Purba, Ratna Tri, Jumakhir, Zamroni
- Rizqi Anggraeni, Dar Agnema, Ali Azril
- Rifla Anwar, Fanani Putri, Irna Ameta

Penyerahan Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK



BPK telah melaksanakan penugasan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah terbagi dalam 3 tahap yakni pada tanggal 9 s.d. November, tanggal 23 s.d. 27 November, dan tanggal 30 November s.d. 9 Desember 2020. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Maka dengan itu, pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dengan 34 Pemerintah Daerah dan 2 BUMD dilaksanakan pada tanggal 7 s.d. 11 Desember 2020.

Pada hari Selasa, 22 Desember 2020, bertempat di Auditorium lantai 1, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengadakan acara Penyerahan Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah s.d. Semester II Tahun 2020 dan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK Per 11 Desember 2020. Penyerahan dilaksanakan secara langsung namun tetap menerapkan protokol kesehatan seperti social distancing, menggunakan masker dan hand sanitizer.

Laporan Hasil Pemantauan diserahkan oleh seluruh Kepala Subauditorat menurut wilayah pemeriksaannya masing-masing kepada Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dan Kepala Divisi Pengawasan PDAM Tirtanadi dengan disaksikan oleh Kepala Perwakilan, Eydu Oktain Panjaitan.

Kepala Perwakilan, Eydu Oktain Panjaitan, melalui sambutannya menyampaikan penghargaan atas usaha dari Pemerintah Daerah se-Provinsi Sumatera Utara dan juga BUMD yang telah menindaklanjuti rekomendasi BPK. BPK juga memahami bahwa upaya tersebut tentu tidak lepas dari keaktifan Inspektorat dari masing-masing pemerintah daerah dan divisi SPI atau Pengawasan BUMD, untuk terus mendorong upaya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi.

Pada kesempatan ini, disampaikan peringkat 3 terbaik penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK sebagai berikut :

Peringkat ke-3: Kabupaten Tapanuli Utara dengan pencapaian 93,05%; Peringkat ke-2: Kabupaten Humbang Hasundutan dengan pencapaian 93,60%;

Peringkat ke-1: Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan pencapaian 94,93%. BPK Sumut juga memberikan apresiasi kepada PDAM Tirtanadi yang telah menyelesaikan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK sebesar 96,15%.

Selain apresiasi atas pencapaian tertinggi dalam penyelesaian tindak lanjut, BPK Sumut juga mengapresiasi Pemerintah Daerah dan BUMD yang memiliki progress peningkatan penyelesaian tindak lanjut tertinggi dari Triwulan II ke Triwulan III sebagai berikut :

Peringkat ke-3 : PT Bank Sumut dengan progress peningkatan penyelesaian Tindak Lanjut 8,01% (dari 64,10% di Tw II menjadi 72,12% di Tw III)

Peringkat ke-2 : Kabupaten Labuhanbatu dengan progress penyelesaian Tindak Lanjut 8,84% (dari 62,12% di Tw II menjadi 70,96% di Tw III)

Peringkat ke-1 : Kabupaten Tapanuli Tengah dengan progress penyelesaian Tindak Lanjut 13,49% (dari 71,66% di Tw II menjadi 85,14% di Tw III)

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2020

Medan - 23 Desember 2020, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengadakan acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun Anggaran 2020 pada 15 (lima belas) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara walaupun sedang dalam kondisi wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Penyerahan dilaksanakan secara langsung namun tetap menerapkan protokol kesehatan seperti social distancing, menggunakan masker dan hand sanitizer. Berdasarkan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan 18 (delapan belas) Pemeriksaan pada Semester II Tahun 2020, Dengan Rincian :



Foto Bersama setelah dilakukan penyerahan

BPK berharap, prestasi-prestasi dalam penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK ini dapat menjadi dorongan dan semangat bagi pemerintah daerah dan BUMD untuk terus berupaya meningkatkan penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK.

Terkait Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah, hasil pemantauan menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian kerugian daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara masih belum optimal.

Diharapkan hasil pemeriksaan BPK dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak dalam memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban laporan keuangan daerah. Dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban laporan keuangan daerah yang baik, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

1. Kepatuhan terhadap penanganan pandemi Covid 19 sebanyak 7 entitas;
2. Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2020 sebanyak 7 entitas;
3. Kinerja Kesehatan atas penanganan Pandemi Covid 19 sebanyak 2 entitas;
4. Kinerja atas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebanyak 1 entitas; dan
5. Kinerja atas Pengelolaan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Utara.

Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Eydu Oktain Panjaitan, kepada Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah yang hadir.



Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara

Kepala Perwakilan, Eydu Oktain Panjaitan, melalui sambutannya mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya perbaikan tata kelola keuangan daerah. Diharapkan melalui hasil pemeriksaan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak dalam memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban laporan keuangan daerah. Dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban laporan keuangan daerah yang baik, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat, secara adil dan merata.

Pada kesempatan ini, BPK juga mengingatkan kepada Pemerintah Daerah agar segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

BPK juga menyampaikan terimakasih kepada DPRD atas perhatian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Semoga hasil-hasil pemeriksaan yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan serta sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah dan jajaran dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk lebih baik dalam pengelolaan keuangan.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA 2020



Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Medan - 28 Desember 2020, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA 2020. Penyerahan dilaksanakan secara langsung namun tetap menerapkan protokol kesehatan seperti social distancing, menggunakan masker dan hand sanitizer.

Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Eydu Oktain Panjaitan, kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Bapak Yasyir Ridho Loebis, S.H., S.T., M.SP., dan mewakili Gubernur Sumatera Utara yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Dr. Ir. Hj. Sabrina, M.Si.

Berdasarkan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan 19 (sembilan belas) Pemeriksaan pada Semester II Tahun 2020. Pada tanggal 23 Desember lalu BPK Sumut telah menyerahkan 18 laporan atas hasil pemeriksaan. Selanjutnya, pada hari ini, 28 Desember 2020, BPK Sumut menyerahkan 1 LHP Kepatuhan atas Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) Tahun Anggaran 2020.

Pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Daerah bertujuan untuk mengetahui dan menilai kepatuhan terhadap pelaksanaan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja bansos, belanja hibah dan belanja bantuan keuangan. Berdasarkan pemeriksaan, Pemprov Sumut dalam melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja daerah belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPK mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya perbaikan tata kelola keuangan daerah. Diharapkan melalui hasil pemeriksaan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak dalam memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban laporan keuangan daerah. Dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban laporan keuangan daerah yang baik, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat, secara adil dan merata.

Pada kesempatan ini, BPK juga mengingatkan kepada Pemerintah Daerah agar segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

BPK juga menyampaikan terimakasih kepada DPRD atas perhatian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Semoga hasil-hasil pemeriksaan yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan serta sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah dan jajaran dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk lebih baik dalam pengelolaan keuangan.

